

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HISTORIS TENTANG USAHA – USAHA PEMERINTAH DALAM MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 1959-1965**

**Oleh**

**Sugesti**

Pada tahun 1950-1959 di Indonesia diberlakukan sistem demokrasi liberal. Yang melandasi sistem prakteknya adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 15 Agustus 1950. Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil dari masing-masing partai yang akan duduk di DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum untuk parlemen diselenggarakan tanggal 29 September, untuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Dewan Konstituante yang dibentuk pada tahun 1955 bertugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun usaha-usaha yang dilakukan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang duduk di dewan ini lebih memperjuangkan kepentingan partainya sendiri-sendiri daripada kepentingan bersama bangsa Indonesia. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden. Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno maka Undang-Undang Dasar Sementara tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap di Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang berlaku dari tahun 1950 juga sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah Apa sajakah Usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dalam rangka Demokrasi terpimpin maka usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965 yaitu membentuk Kabinet, membentuk MPRS dan DPAS, menetapkan GBHN, membentuk Front Nasional, dan membentuk DPR-GR.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965 yaitu membentuk Kabinet, membentuk MPRS dan DPAS, menetapkan GBHN, membentuk Front Nasional, dan membentuk DPR-GR. Yang dengan pelaksanaan program kerja dari Kabinet Kerja dan ditunjukkannya keberhasilan dan berfungsinya lembaga-lembaga seperti MPRS, DPAS dan DPR-GR dalam tugasnya hal ini membuat situasi pemerintah dan ketahanan nasional di Indonesia semakin mantap.